

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam memandang bahwa bumi adalah anugerah dari Tuhan untuk umat manusia untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan diharapkan untuk kemaslahatan semua orang. Islam juga mengontrol semua usaha manusia di berbagai bagian kehidupan, termasuk pertukaran moneter. Oleh karena itu, kerangka keuangan berbasis syariah juga diharapkan dapat diterapkan di bidang moneter. Keakraban dengan umat Islam tentang pentingnya kerangka moneter yang bergantung pada Al-Qur'an dan Sunnah adalah dasar bagi fondasi perbankan Islam di berbagai negara. Perbankan syariah sebagai bagian dari perbankan nasional telah menjadi motor penggerak perekonomian nasional.

Perbankan syariah muncul di Indonesia yang dipisahkan oleh berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia menunjukkan peluang bagi bank syariah untuk terus berkembang. Adapun Perkembangan Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia ditunjukkan dengan Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1. 1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Keterangan	Tahun								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Bank Umum Syariah (BUS)	11	11	11	12	12	13	13	14	14
Jumlah Kantor	1401	1745	1998	2151	1990	1869	1825	1875	1919

Jumlah Laba/Rugi (Milyar Rp)	1002	1654	1576	1773	1788	952	990	2806	4195
------------------------------------	------	------	------	------	------	-----	-----	------	------

sumber : Statistik Perbankan Syariah 2019 (Ojk, 2019)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada tahun 2011 Jumlah BUS di Indonesia berjumlah 11, dengan jumlah kantor yang 1.401, dan jumlah Laba sebesar Rp. 1.002 Milyar. Pada tahun 2012 mengalami pada jumlah kantor sebesar 1.745, dan jumlah Laba yang dihasilkan sebesar Rp. 1.654 Milyar. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan pada jumlah kantor sebesar 1.998, dengan jumlah laba sebesar rp. 1.576 Milyar. Pada Tahun 2014 mengalami kenaikan jumlah BUS menjadi 14, jumlah kantor 2.151 dan jumlah laba Rp. 1.773 Milyar. Pada tahun 2015 terjadi penurunan pada jumlah kantor sebesar 1.990 dengan jumlah laba sebesar Rp. 1.788 Milyar. Pada tahun 2016, mengalami kenaikan pada jumlah BUS menjadi 13, dengan jumlah kantor 1.869 dan jumlah laba sebesar Rp. 952 Milyar. Pada tahun 2017 jumlah kantor 1825 dan jumlah laba sebesar Rp. 990 Milyar. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan pada jumlah BUS menjadi 14, jumlah kantor 1.875 dan jumlah laba sebesar Rp. 2.806 Milyar. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan pada jumlah kantor menjadi 1.919 dengan jumlah laba sebesar Rp. 4.195 Milyar.

Eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal dimulai sejak diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan di Indonesia yang merupakan hasil revisi dari UU No.7 tahun 1998. Dalam UU ini terdapat perubahan yang memberikan peluang yang besar dan landasan hukum yang lebih

kuat bagi pengembangan perbankan syariah serta memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah.

Bank Islam menyelesaikan kegiatan usahanya tergantung pada standar syariah. Oleh karena itu, segala aktivitas yang dilakukan bank syariah tidak boleh menyimpang dari standar syariah, mengingat penyusunan rangkuman anggaran. Laporan keuangan merupakan proses akhir dalam proses akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah perusahaan. (Dian mulya, 2017) menyatakan bahwa salah satu tujuan pengungkapan moneter adalah memberikan data moneter yang dapat menunjukkan keberhasilan organisasi dalam menciptakan manfaat. Jadi, laporan yang berkualitas, yang dibebaskan dari kontrol dan mengungkapkan data sesuai dengan kebenaran yang ditetapkan, menjadi perhatian yang sah untuk beberapa pertemuan.

Perencanaan laporan keuangan eksekutif organisasi menggunakan ide penting dari pertemuan karena dapat memberikan data yang lebih baik tentang kinerja keuangan organisasi dibandingkan dengan data yang dibuat dari premis uang. Dengan menggunakan metode basis akrual, dapat mempermudah manajer dalam mengelola laba perbankan syariah tanpa menyimpang dari aturan Standar Akuntansi Keuangan Yang Berlaku Umum karena telah memilih metode akuntansi yang sesuai. Apabila target perbankan syariah tidak tercapai maka pihak manajer perbankan syariah dapat mengubah komponen-komponen akrual yang dilaporkan (Anggraini, 2020).

Di dalam suatu perusahaan pihak manajemen bukan merupakan pemilik perusahaan melainkan pengelola. Pemisahan kepemilikan ini dapat menimbulkan konflik dalam pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang menyebabkan para manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan para pemilik. Sehingga, pihak manajemen mempunyai informasi tentang perusahaan yang lebih luas dibandingkan pemiliknya (Arfan Zuhdi, 2017). Ketidakseimbangan informasi ini akan mendorong perilaku manajemen untuk membuat laporan keuangan dengan menaikkan atau menurunkan laba untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui kebijakan-kebijakan yang digunakan, seperti melakukan *creative accounting* dengan tujuan agar kinerja manajemen terlihat bagus, karena manajemen mengetahui kondisi internal perusahaan dan prospek perusahaan untuk masa mendatang (Arfan Zuhdi, 2017).

Setiap manajer wajib melaporkan data keadaan perusahaan kepada investor. Meskipun demikian, data yang dikirimkan tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Kondisi ini sering disebut sebagai data yang tidak rata atau data yang miring. Ketimpangan data dapat terjadi karena manajer mengetahui data perusahaan daripada pemilik atau investor, sehingga para eksekutif akan berusaha untuk mengontrol organisasi yang diungkap untuk keuntungan mereka sendiri. (Praditia & Marsono, 2010). Perilaku manipulasi oleh manajer tersebut, berupa *earnings management* atau manajemen laba.

Earning Management atau Manajemen laba adalah tindakan manajemen yang menyusun laporan keuangan eksternal dengan cara menaikkan, menurunkan atau meratakan laba demi mendapatkan keuntungan pribadinya. Manajemen laba

didefinisikan usaha manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja keuangan (yofi prima, 2018). Manfaat dari manajemen laba yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pihak tertentu meskipun dalam jangka panjang tidak ada perbedaan laba kumulatif perusahaan dengan laba yang diidentifikasi sebagai keuntungan (Arifin, 2016). Laporan keuangan yang dihasilkan dari manajemen laba mungkin bias. Tujuan dari bias yaitu agar laporan tersebut menggunakan proses akuntansi tertentu untuk memberikan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan investor atau keinginan manajer.

Sejumlah besar literatur telah membicarakan kekhawatiran manajemen laba pada industri perbankan. Menurut penelitian sebelumnya, bank sering terlibat dalam tindakan manajemen laba. (Ismail and Be Lay, 2002). Dalam kasus perbankan syariah, memang benar bahwa konsep manajemen laba bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral yang menjadi landasan lembaga-lembaga ini, nilai-nilai yang biasanya melarang tindakan diskresioner dan membatasi praktik mengabaikan etika akuntansi. Tetapi, lembaga tersebut sama dengan perusahaan lain dan dihadapkan pada informasi yang tidak simetri dan konflik kepentingan (Safieddine, 2009) yang dapat mengarah pada tindakan oportunistik yang melanggar hukum islam. Manajer mungkin memalsukan informasi akuntansi, terutama hasil akhir, untuk meningkatkan kinerja bank, dan dengan demikian menyesatkan pengguna, dengan informasi yang lebih baik tentang status bank.

Secara umum, cara yang digunakan perusahaan untuk bermain dengan skala pendapatan mereka adalah dengan menggunakan konversi atau konversi

teknik akuntansi yang digunakan. Manajer memiliki kebebasan untuk melakukan ini. Jika supervisor berkeinginan untuk membuat pendapatannya lebih dari harga sebenarnya dalam jangka waktu tertentu, maka ada banyak peluang yang bisa dilakukan. Misalnya, dengan bantuan penggunaan mengubah gaya hidup menguntungkan yang diharapkan dari properti konstan menjadi lebih besar, mengubah teknik penyusutan menjadi garis segera, menurunkan proporsi kerugian piutang, dan sebagainya. Sedangkan jika manajer berkeinginan untuk membuatnya lebih kecil dari nilai sebenarnya, maka manajer dapat memperkirakan perkiraan moneter aset menjadi lebih kecil, mengubah pendekatan penyusutan ke saldo menurun, kuantitas bagian biaya, dan lain-lain. Meskipun memiliki kebebasan untuk mengubah pendekatan akuntansi yang digunakan, korporasi memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan semua teknik yang digunakan dalam laporan ekonomi. Hal ini menjadi selesai karena upaya untuk mengungkapkan perubahan dalam teknik akuntansi dapat membuat perusahaan lepas dari pelanggaran standar akuntansi (Praditia & Marsono, 2010). Oleh sebab itu, informasi mengenai laba harus sama dengan kondisi perusahaan sebenarnya.

Kondisi keuangan global pada tahun 2008 mengalami kualitas buruk pada pelaporan keuangan yang mengakibatkan jatuhnya bank dan menyebabkan jatuhnya ekonomi (Hanifa, 2012). Perilaku manajer harus diawasi demi mencegah kondisi seperti itu. *Shareholders* atau pemegang saham wajib menerapkan mekanisme pengawasan yang bisa membatasi tindakan oportunistik manajer dalam mengatasi hal tersebut. Terjadinya perilaku oportunistik manajer disebabkan karena kurangnya penerapan tata kelola perusahaan. Tanda utama dari

kurangnya penerapan tata kelola perusahaan adalah perilaku mementingkan diri sendiri demi keuntungan pihak manajer (Mahiswari, 2014). Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan keagenan tersebut adalah dengan menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Pengertian *Good Corporate Governance* adalah suatu susunan dan struktur yang digunakan oleh organ-organ perusahaan untuk memajukan keberhasilan bisnis dan akuntabilitas perusahaan dalam rangka menjaga harga diri pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan mitra lain, berdasarkan hukum dan arahan serta nilai-nilai moral (Rahmita Wulandari, 2018). *Good Corporate Governance* adalah salah satu cara untuk menghilangkan upaya rekayasa yang dilakukan oleh manajer, khususnya dengan membuat arahan di sekitar prasyarat bagi perusahaan untuk mengungkapkan data tertentu dengan cara yang diperlukan (diperintahkan) dan disengaja untuk kemajuan anggaran (Praditia & Marsono, 2010).

Proses *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah diketahui sebagai mekanisme dalam meningkatkan kepercayaan, karena masyarakat butuh kepercayaan saat bertransaksi terutama dalam pendanaan dan pembiayaan. Kepercayaan termasuk intepetasi pada konsep amanah dalam aturan islam, yang menunjukkan bahwa harta adalah milik Allah SWT, dan manusia secara individu ataupun kolektif adalah penjaganya (Triana & I, 2019).

Mekanisme tata kelola perusahaan yang baik yaitu, upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan rasa tanggung jawab perusahaan

yang beroperasi dapat menjadi hambatan bagi keuntungan manajemen. Oleh karena itu, perusahaan yang secara konsisten mengikuti prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan menurunkan tingkat manajemen hasil.

Mekanisme tata kelola Bank Umum Syariah Indonesia telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/2009 / PBI yang mengatur tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi bank umum dan unit usaha syariah. Secara umum, bank syariah memiliki mekanisme GCG yang sama dengan bank tradisional, terdiri dari dewan direksi, dewan direksi, dan berbagai komite yang membantu mengawasi dewan direksi sebagai pihak eksternal. Satu-satunya perbedaan adalah keberadaan Komite Pengawas Syariah (DPS), yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan bank umum syariah dan menegakkannya dengan hukum Syariah.

Mekanisme *corporate governance* dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya *earnings management*, salah satu indikatornya adalah pengawasan dari anggota komisaris independen. Keberadaan komisaris independen efektif dalam hal pengawasan dan pengelolaan. Dalam pengawasan dan pengelolaan, efektif komisaris independen hanya menjabat sebagai komisaris independen di satu perusahaan dan tidak merangkap jabatan di perusahaan lain. (Launa & Respati, 2014). Penelitian dari (Arifin, 2016), (Dwi Astika, 2014) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba. Tetapi, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh (Restuningdiah, 2011), (Welvin I Guna, 2010) dan (Sari, 2013) yaitu komisaris independen berpengaruh negatif pada manajemen laba.

Kepemilikan institusional adalah cara untuk menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif bagi manajer oportunistik dengan memperkuat pengawasan. Penelitian yang dijalankan oleh (Arlita, 2019), (Sari, 2013) dan (Adrianto, 2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tindakan manajemen laba. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerapan mekanisme kepemilikan institusional dapat memberikan kontribusi terhadap tindakan manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Mahiswari, 2014) dan (Dewi, 2016), mengatakan hasil yang berbeda yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

Direksi merupakan sistem manajemen yang dapat mengoptimalkan peran anggota dewan dalam penerapan tata kelola perusahaan. Direksi juga bertanggung jawab untuk meninjau kinerja manajemen untuk memastikan operasi normal perusahaan dan melindungi kepentingan pemegang saham (Rahmita Wulandari, 2018). Tetapi, kebutuhan jumlah direksi yang banyak juga dapat menyebabkan hilangnya komunikasi dan pada akhirnya menimbulkan masalah antara direktur dan agen. Hasil penelitian oleh (Mersni & Othman, 2015), (Arifin, 2016) dan (Rizka, 2015) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian oleh (Putra, 2019) dan (Pradipta, 2011) yang menyatakan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh

positif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan, semakin kuat pengelolaan hasil.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan manajemen atas saham perusahaan, yang memungkinkan manajemen untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan (Audina, 2020). Kepentingan manajemen dan pemegang saham selaras. Dengan cara ini, ketika manajer membuat keputusan, jika mereka membuat kesalahan, mereka akan langsung diuntungkan dan menanggung kerugian. Kepemilikan manajemen yang besar akan mempengaruhi manajemen untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga manajemen lebih memperhatikan pemegang saham dari manajemen itu sendiri. Jangan berikan insentif manajemen untuk mengelola pendapatan (Dimarcia & Krisnadewi, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh (Triana & I, 2019) dan (Mersni & Othman, 2015) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada manajemen laba. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan (Jao, 2011) dan (Dwi Astika, 2014) yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada manajemen laba.

Komite audit adalah bagian dari tata kelola perusahaan dan fungsinya membantu dewan direksi mengawasi proses pelaporan keuangan untuk mencegah penipuan. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) menegaskan harapannya dengan keberadaan komite audit dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, mengoptimalkan mekanisme kontrol dan keseimbangan, serta memberikan perlindungan terbaik bagi pengawasan internal perusahaan. Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya (Asri, 2018). Penelitian yang dilakukan (Mersni & Othman, 2015) dan (Restuningdiah, 2011) searah

dengan pernyataan tersebut bahwa komite audit yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi ataupun keuangan dapat mengurangi tindakan manajemen laba. Sedangkan pada penelitian (Puspitasari, 2019) dan (Adrianto, 2014) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang memastikan bahwa kegiatan Bank Syariah sesuai dengan prinsip Syariah. Dewan Pengawas Syariah dapat mencegah terjadinya manajemen laba. Semakin banyak komite pemantau syariah, semakin tidak ada manajemen laba (Triana & I, 2019). Penelitian (Kodriyah, 2017) dan (Mersni & Othman, 2015) menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan pada penelitian (Anggraini, 2020) dan (Nurjannah, 2017) menemukan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel yang berhubungan dengan praktik manajemen laba. Ukuran perusahaan adalah skala dimana ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, termasuk: total aset, ukuran terdaftar, dan nilai pasar (Rahmita Wulandari, 2018). Perusahaan kecil dianggap lebih mungkin menerapkan manajemen kesejahteraan daripada perusahaan besar. Hal ini dikarenakan usaha kecil seringkali ingin menunjukkan status perusahaan yang selalu berkinerja baik, agar investor dapat menanamkan uangnya ke dalam perusahaan tersebut. Perusahaan besar lebih memperhatikan publik, membuat mereka lebih berhati-hati dalam menerapkan informasi keuangan, sehingga dapat lebih akurat melaporkan dampaknya terhadap perusahaan (Sari, 2013). Penelitian yang dilakukan (Emi, 2014) dan (Asward,

2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jao, 2011)(Jao, 2011) dan (Puspitasari, 2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

Selain penerapan tata kelola perusahaan dan ukuran perusahaan, ada faktor lain yang dapat mengarahkan manajer ke manajemen laba, yaitu leverage/utang. Penggunaan utang yang efektif dan efisien akan meningkatkan nilai suatu usaha, namun jika ada alasan untuk menarik perhatian kreditur justru akan memicu praktik manajemen laba. (yofi prima, 2018) dan (Puspitasari, 2019) melakukan penelitian yang menghasilkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Apabila semakin besar rasio hutang, Semakin tinggi nilai hutang perusahaan maka akan menimbulkan kecenderungan untuk melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba. Sedangkan, hasil penelitian (Mahiswari, 2014) dan (Sari, 2013) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Mersni & Othman, 2015). Dimana penelitian yang dilakukan oleh (Mersni & Othman, 2015) menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba, konsep indikator mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah ukuran dewan, komposisi dewan, struktur kepemimpinan, komite audit, konsentrasi kepemilikan, dan kepemilikan manajemen. Dalam penelitian tersebut menggunakan sampel

penelitian 20 Bank Islam di wilayah Timur Tengah dari platform intelijen bisnis online terkemuka yang berfokus pada Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Pada penelitian ini, terdapat perbedaan-perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu :

1. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2019.
2. Pada penelitian (Mersni & Othman, 2015) mekanisme *corporate governance* yang digunakan adalah komite audit, ukuran dewan direksi dan dewan pengawas syariah karena dapat mencegah praktik manajemen laba. Adanya penambahan variabel independen yaitu komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Karena variabel tersebut mampu mengurangi praktik manajemen laba. Komisaris independen dan kepemilikan institusional berfungsi untuk mengurangi insentif untuk manajer yang egois melalui pengawasan yang ketat. Serta, kepemilikan manajerial mampu menciptakan kinerja perusahaan secara optimal. Sehingga pada penelitian ini mekanisme *corporate governance* yang digunakan adalah komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran dewan direksi dan dewan pengawas syariah.
3. Adanya penambahan variabel *Leverage* terhadap manajemen laba pada penelitian di perbankan syariah di Indonesia. Karena *leverage* termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya manajemen laba. Hampir semua perusahaan pasti memiliki utang jangka panjang. Berdasarkan

uraian diatas, maka penelitian ini berjudul ”**PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**”.

1.2 Rumusan Masalah

Penerapan mekanisme *corporate governance* merupakan sistem yang tidak hanya dapat menyelesaikan konflik keagenan, tetapi juga meminimalkan perilaku manajemen laba dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Indikator *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi ukuran komisaris independen, kepemilikan konstitusional, ukuran dewan direksi, dan ukuran perusahaan. Selain itu, *leverage* juga dapat mempengaruhi terjadinya manajemen laba.

Motivasi pada penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Arlita, 2019), (Sari, 2013) dan (Adrianto, 2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tindakan manajemen laba Berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mahiswari, 2014) dan (Dewi, 2016). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Arifin, 2016), (Dwi Astika, 2014) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap terjadinya manajemen laba. Namun, penelitian tersebut berbeda dengan (Restuningdiah, 2011), (Welvin I Guna, 2010) dan (Sari, 2013). (Mersni & Othman, 2015), (Arifin, 2016) dan (Rizka, 2015) menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif pada manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian (Pradipta, 2011) yang menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian yang

dilakukan oleh (Triana & I, 2019) dan (Mersni & Othman, 2015) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan (Jao, 2011) dan (Dwi Astika, 2014) yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan (Mersni & Othman, 2015) dan (Restuningdiah, 2011) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari, 2019) dan (Adrianto, 2014). Penelitian (Kodriyah, 2017) dan (Mersni & Othman, 2015) menyatakan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian (Anggraini, 2020) dan (Nurjannah, 2017) menemukan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan (Emi, 2014) dan (Asward, 2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Jao, 2011) dan (Puspitasari, 2019). (yofi prima, 2018) dan (Puspitasari, 2019) melakukan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba namun berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mahiswari, 2014) dan (Sari, 2013). Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti dapat dituangkan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh dewan pengawas syariah terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia?
7. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia?
8. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertolak pada latar belakang permasalahan di atas maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia.

4. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia.
6. Menganalisis pengaruh dewan pengawas syariah terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia.
7. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia.
8. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk meningkatkan pengungkapan corporate governance perbankan syariah, membatasi perilaku diskresi manajer, mencegah manajemen laba yang radikal, dan menemukan mekanisme paling efektif yang dapat diterapkan untuk mencegah perilaku tersebut. Perilaku oportunistik.

2. Bagi Investor

Dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh mekanisme corporate governance dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia sehingga dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi tentang *corporate governance* dan manajemen laba dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* dan leverage terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia.

4. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami peranan praktek *corporate governance* terhadap tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan.

5. Bagi Pihak Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* dan leverage terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia untuk penelitian di masa mendatang.

6. Bagi Regulator

Diharapkan dapat menetapkan standar yang lebih baik di masa yang akan datang mengenai *corporate governance*.